

**ANTARA *CIVIC MAKING* DAN *PROFIT MAKING*:
MENCARI PEMBIAYAAN ALTERNATIF ORGANISASI
MASYARAKAT SIPIL INDONESIA DI ERA NEOLIBERAL**



UNIVERSITAS GADJAH MADA

**Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
Dalam Bidang Bisnis dan Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada**

**Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar
Universitas Gadjah Mada
tanggal 27 Februari 2025**

**oleh:
Prof. Dr. Amalinda Savirani, M.A.**

Yang saya hormati,

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada;

Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada;

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada;

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada;

Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;

Rekan-rekan dosen, mahasiswa, segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada,

para tamu undangan, serta keluarga yang saya cintai.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan anugerah waktu, kesempatan, dan kesehatan pada kita semua sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama di Balai Senat Universitas Gadjah Mada.

Hari ini saya akan menyampaikan pidato penguohan Guru Besar dalam bidang “bisnis dan politik”, di Departemen Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Saya memberi judul pidato ini “Antara *civic making* dan *profit making*: Mencari Pembiayaan Alternatif Masyarakat Sipil Indonesia di era Neoliberal”. Pidato ini bertujuan mendiskusikan kembali topik yang telah dibicarakan di kalangan aktivis sejak satu dekade lalu, tapi tetap relevan sampai sekarang. Isi pidato ini adalah hasil refleksi saya mengajar kelas-kelas dengan topik Masyarakat Sipil, meneliti topik ini, dan hasil interaksi saya secara langsung dengan kawan-kawan di Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) atau LSM, di Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir.

Ada tiga pertanyaan kunci yang akan saya jawab dalam pidato ini. **Pertama**, mengapa dan bagaimana kondisi krisis pendanaan OMS saat ini terjadi? **Kedua**, apa opsi yang tersedia untuk keluar dari krisis tsb, dan mungkinkah OMS mencari pembiayaan alternatif dengan menjadi aktor ekonomi, tapi juga tetap merawat gerakan sosial? **Ketiga**, kalau ya, apa opsi yang tersedia dan bagaimana OMS menyeimbangkan

ketegangan antara *civic making* dan *profit making* agar mereka tidak terjebak dalam watak gerakan sosial berciri neoliberal?

Hadirin yang saya muliakan,

Di awal era Reformasi 1998, jumlah OMS di Indonesia tercatat lebih dari 300 ribu. OMS hadir di semua sektor kehidupan mulai dari reformasi di sektor pemilihan, kesetaraan gender, lingkungan hidup, sampai dengan tata kelola organisasi publik. Data terakhir di tahun 2023, jumlahnya menurun drastis dan tak sampai 8.000 unit¹. Penurunan jumlah ini disebabkan salah satunya karena terus menurunnya dukungan pendanaan dari organisasi donor internasional. Selain itu, Indonesia yang telah “naik kelas” menjadi “Middle Income Country” membuatnya tidak lagi menjadi prioritas target bantuan internasional. Dalam minggu-minggu terakhir ini kita juga membaca berita pembekuan sementara bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat melalui USAID oleh Presiden Donald Trump kecuali untuk isu militer di Israel dan Mesir². Dampak pembekuan sementara ini juga dialami beragam program USAID di Indonesia di beragam sektor.

Memang, salah satu ciri OMS di Indonesia adalah ketergantungannya pada pendanaan dari lembaga donor internasional. Kajian menunjukkan tingkat ketergantungannya sebesar 85% (Antlöv dkk. 2010, Davies 2013). Akibatnya OMS dan program-program nya sulit berkelanjutan secara jangka panjang. Tidak hanya itu, agenda-agenda demokrasi yang diusung oleh OMS terancam dan tidak berkelanjutan.³

¹ <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/676152c5d673d/ini-jumlah-ormaslsn-di-indonesia-hingga-2023>

² <https://www.telegraph.co.uk/us/politics/2025/01/25/trump-freezes-foreign-aid-under-america-first-policy/>

³ Istilah “keberlanjutan” di sini saya definisikan sebagai “kemampuan untuk meningkatkan kapasitas institusional, untuk dapat terus melanjutkan aktivitas dalam periode waktu tertentu, dengan meminimalkan kerentanan keuangan, melakukan diversifikasi sumber daya, dan memaksimalkan dampak dengan cara menyediakan jasa dan produk komoditas” (Benton dan Monroy 2004:2)

Dalam satu dekade terakhir, kualitas demokrasi global termasuk di Indonesia, terus menurun. Para ahli menilai menyebutnya sebagai “regresi demokrasi” dengan salah satu ciri terus menyempitnya ruang sipil (Warburton dan Aspinall 2019). Ruang ini adalah menjadi arena tempat berkiprah Masyarakat Sipil. Situasi menurunnya demokrasi ini justru semakin membutuhkan keberadaan Masyarakat Sipil. Tapi di sisi yang lain, OMS juga sedang *struggling* bertahan untuk tetap hidup. Dalam konteks inilah diskusi pencarian alternatif pembiayaan OMS makin penting kita lakukan.⁴

Hadirin yang saya hormati,

Sebelum menggali lebih dalam topik ini, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan apa itu “Masyarakat Sipil”. Makna konsep ini sangat luas dan memiliki banyak perspektif. Kalangan pluralis berargumen bahwa keberadaan Masyarakat Sipil adalah ciri dari sistem demokrasi (Diamond 1999). Tanpa Masyarakat Sipil, maka tidak ada demokrasi. Di negara otoritarian, eksistensi Masyarakat Sipil dibatasi seiring dengan pembatasan kebebasan sipil (*civil liberties*). Masyarakat Sipil adalah arena politik (*political space*) di luar negara. Mereka terorganisir dalam bentuk gerakan bersama (*collective action*, berbasis kesukarelaan, berciri informal, dan bertujuan memengaruhi kebijakan negara (Weiss dan Hansson 2023). Pemikir lain seperti Edward Shills (1997) menekankan ciri “civility” Masyarakat Sipil dan semangat kepublikannya (*public civic spirit*), yakni kepedulian pada isu-isu

⁴ Dalam konteks Indonesia lembaga donor juga telah berupaya mendorong keberlanjutan OMS. Yayasan Ford melalui program “BUILD” (Building Institutions and Networks Initiative) mendorong keberlanjutan OMS (NIRAS 2022), termasuk di Indonesia. BUILD mendukung pendanaan dengan memfasilitasi OMS dalam bentuk pendanaan tahun jamak (*multiyear*), yang bersifat fleksibel dalam pembelanjannya. Program USAID MADANI berfokus pada penguatan Organisasi Masyarakat Sipil di tingkat lokal demi mendorong keberlanjutannya. USAID MADANI menerbitkan buku panduan bagaimana strategi memobilisasi pendanaan (Hamid. n.d). Kajian lain soal keberlanjutan pendanaan pernah dilakukan oleh Chandrakirana dkk (2002), dan Hoelman (2021).

publik. Karenanya, salah satu tujuan Masyarakat Sipil adalah menciptakan *civic making*, yakni keaktifan warga negara dalam mendorong kualitas kehidupan berlandaskan prinsip *civic*, kewargaan, dalam upaya melawan ketimpangan dan ketidakadilan.⁵ Kalangan Marxist mendefinisikan Masyarakat Sipil tak lebih dari arena dominasi negara dan kelas borjuis (Adloff 2021: 152), dan tak lebih dari alat kelompok borjusi dalam melanggengkan sistem kapitalisme. Pemikiran ini tidak melihat kaitan antara keberadaan Masyarakat Sipil dengan demokrasi. Di sini kita melihat dua perspektif berbeda dalam mendefinisikan Masyarakat Sipil.

Dalam pidato ini, definisi Masyarakat Sipil yang saya gunakan mengikut alur pemikiran pluralis, berakar dari pemikiran Alexis de Tocqueville, yakni *organisasi* di arena di luar negara. Yang menjadi fokus saya adalah OMS yang *terlembaga (institutionalized)*, dan dikenal sebagai LSM. Saya memahami bahwa Masyarakat Sipil di Indonesia sangat plural, termasuk gerakan berbasis keagamaan (seperti Muhammadiyah dan NU, dan dari agama lain), berbasis kesukarelaan (seperti gerakan mahasiswa, dan gerakan orang muda, beragam kolektif, termasuk juga “Aksi Kamisan”) yang sekarang marak di mana-mana dimotori anak muda. Mereka semua tidak selalu membutuhkan pendanaan dari lembaga donor, dan juga tidak terlembaga secara kuat. Saya juga sensitif pada pemikiran Marxist kritis terkait Masyarakat Sipil, khususnya dalam aspek bagaimana struktur ekonomi politik, termasuk politik pendanaan, memengaruhi ideologi dan arah gerakan OMS.

Hadirin yang saya muliakan,

Selain memperjelas definisi OMS, perlu juga saya gali kaitan OMS dengan unit kepolitikan lain yakni negara, Masyarakat Ekonomi, dan Masyarakat Politik (Cohen dan Arato 1994). Masing-masing entitas ini memiliki orientasi yang berbeda. Negara adalah pemilik legitimasi politik yang sah (*legitimate*) untuk dapat melakukan peran koersif, melakukan pelayanan publik, dan memungut pajak. Sementara

⁵ Selain yang berciri “sipil” ada juga OMS yang berciri “uncivil” dan illiberal, yang kegiatannya justru melawan prinsip-prinsip dasar demokrasi. .

Masyarakat Politik (seperti partai politik) bertujuan mencapai kekuasaan melalui lembaga demokrasi seperti partai politik dan lembaga perwakilan. Masyarakat Ekonomi berorientasi pada keuntungan atau *profit making*⁶ sekaligus menjadi aktor ekonomi.

Relasi keempat unit ini sangat unik di Indonesia. Ia tidak bersifat ketat dengan batas yang jelas. Keempatnya bersifat saling masuk dan memengaruhi. Masyarakat Sipil adalah pendukung utama Reformasi⁷. Selama lebih dari 25 tahun pasca reformasi, aktivis pro demokrasi banyak yang masuk ke arena negara dan Masyarakat Politik (menjadi politisi). Mereka mencoba mendorong agenda-agenda demokrasi *dari dalam* sistem (Prasetyo, Priyono dan Törnquist, 2003; Savirani dan Törnquist, 2015, Mietzner 2013), meski banyak juga yang terkooptasi. Selama lebih dari dua dekade ini, negara pun “menyerap” ide-ide Masyarakat Sipil dalam beragam kebijakannya. Agenda jaminan kesehatan yang saat ini sudah menjadi hak semua warga negara, diawali oleh gerakan buruh melalui Koalisi Aksi Sistem

⁶ Di abad ke-20, dikotomi antara Masyarakat Sipil dan Masyarakat Ekonomi terus menguat, seiring dengan menguatnya pemikiran liberal yang menyandarkan diri pada kebebasan individu, dan keberagaman; serta beriringan dengan menguatnya sistem ekonomi pasar neoliberal.

⁷ Di Indonesia, telah banyak kajian tentang masyarakat sipil dan kaitannya dengan demokrasi. khususnya sejak *Reformasi* 1998. Uhlin (1997) menggali “oposisi yang berserak” di Indonesia yang menjadi ciri demokrasi gelombang ketiga. Hadiwinata (2003) menggali peran Masyarakat Sipil di era transisi dari rejim otoritarian ke demokrasi. Aspinall (2005) menggali hal yang sama di periode transisi demokrasi. Prasetyo, Priyono, dan Törnquist, (2003) mengevaluasi gerakan demokrasi beberapa tahun setelah Reformasi, dan menggali peran gerakan akar rumput. Di periode berikutnya Törnquist mendeteksi bagaimana gerakan LSM telah menjadi “transformative politics” yang ditandai dengan masuknya aktivis ke dalam ranah negara (Törnquist, 2013; Savirani dan Törnquist, 2015); dan menghasilkan makin memudarnya batas negara dan Masyarakat Sipil (Norén-Nillson, Savirani, Uhlin 2023: 8). Inti dari semua kajian tsb adalah sentralnya peran Masyarakat Sipil dalam menjaga demokrasi di Indonesia, dan beragam transformasi peran yang mereka lakukan dalam lebih dari 20 tahun terakhir.

Jaminan Sosial (KAJS) pada tahun 2009. Ide perlindungan pada kelompok perempuan, yang saat ini telah juga menjadi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), telah lama didorong oleh aktivis perempuan. Keduanya adalah hasil dorongan elemen Masyarakat Sipil dan berkolaborasi dengan para wakil rakyat di dalam gedung perwakilan rakyat. Tentu saja tidak semua dorongan Organisasi Masyarakat Sipil berhasil mendorong agenda kebijakan. RUU Perampasan Aset yang didorong oleh gerakan anti korupsi belum juga disahkan.⁸

Beriringan dengan itu, Indonesia telah makin terintegrasi dalam praktek ekonomi neoliberal yang ditandai dengan terus berkurang peran negara dalam mengurus isu publik dan menguatnya peran sektor swasta. Praktek ini juga ditopang oleh kerangka kelembagaan berciri jaminan hak kepemilikan individual dan operasi pasar bebas (Harvey 2005). Neoliberalisme juga ditandai dengan penetrasi logika pasar bebas dalam kehidupan sehari-hari, dan dampak strukturalnya pada ketimpangan ekonomi dan kerusakan alam. Neoliberalisme juga seolah menjadi satu-satunya model yang *legitimate* terkait reproduksi kehidupan sosial (Carrol dan Jarvis 2015: 277). Dalam konteks OMS, neoliberalisme berbentuk peningkatan logika managerialisme akibat kontrol dari lembaga donor. Banyak pegiat OMS mengeluh dibuat sibuk mengurus laporan keuangan dan *workplan*.

Hadirin yang saya hormati,

Entitas Masyarakat Sipil (yang berorientasi pada *civic making*) dan Masyarakat Ekonomi (yang berorientasi pada *profit making*) saling beririsan. Sejarah pergerakan negeri kita dimulai oleh para pengusaha

⁸ Masyarakat Ekonomi atau pebisnis pun telah masuk ke arena negara. Banyak pengusaha menjadi menteri dan politisi. Jumlah politisi dengan latar belakang bisnis terus meningkat dari pemilu ke pemilu, demikian juga dengan para menteri yang juga adalah pengusaha. Relasi bisnis dan politik semakin kuat di Indonesia telah menjelma menjadi sebuah sistem yang dikenal sebagai “kekuatan oligarki” (Hadiz dan Robison 2004). Orientasi mereka tunggal yakni mencari keuntungan atau *profit making* dan menggunakan politik sebagai jalur utama untuk memperkuat kegiatan *profit making*.

batik di Surakarta. Gerakan Syarikat Dagang Islam (SDI) yang lahir di Solo di awal abad ke-18 menggunakan koperasi sebagai alat perjuangan memperkuat ekonomi, sekaligus alat politik melawan kolonialisme Belanda (Shiraishi 1999). Muhammadiyah yang lahir pada tahun 1912 memulai kegiatan pembaharuan agama beriringan dengan aktivitas sosial di bidang pendidikan. Selain itu, mereka melakukan kegiatan memobilisasi dana umat secara sukarela, dan mengembangkannya menjadi unit usaha sosial di bidang pendidikan dan kesehatan, sebagaimana juga agama lain seperti Kristen dan Katolik (Fauzia 2017). Saat milad ke-112 tahun lalu, aset dan kekayaan Muhammadiyah diperkirakan sebesar Rp 400 triliun (Faizi 2024).

Ketika saya memikirkan topik pidato ini, khususnya irisan-irisan yang terjadi antara entitas kemasyarakatan di atas, Saya terinspirasi dengan kerangka pikir yang dibangun oleh pemikir asal Jerman yakni Karl Polanyi. Dalam buku “The Great Transformation”, Polanyi berargumen bahwa praktik ekonomi tidak pernah dapat dipisahkan dari praktik sosial dan politik. Praktek ekonomi selalu menempel, atau *embedded*⁹ (dan juga *disembedded*) pada praktek sosial. Operasi kerja ekonomi pasar pun tidak pernah berciri “self-regulating” melalui mekanisme “invisible hand”, melainkan “...should be immersed in socio-political relations to effectively contribute to the expression of the public interest” (Roy dkk. 2021:380).

Meski Polanyi tidak mengaitkan gagasannya secara langsung dengan Masyarakat Sipil, saya merefleksikan logika *embeddness* ini dan mengaitkan saling masuknya praktik *civic making* dan *profit making*. Pertanyaan yang terus berputar di kepala saya adalah mungkinkah praktek *civic making* (melalui gerakan OMS) menggunakan logika *profit making*? Mungkinkah aktor gerakan sosial

⁹ Konsep “embeddness” Polanyi perlu dilihat dalam lapis-lapisan, atau *multilayered*, mulai dari mikro, meso dan makro. “Mikro” di sini terkait dengan keseharian kehidupan warga (*everyday life*) dan model organisasi OMS sendiri. “Meso” terkait dengan sistem nasional, dan “makro” terkait dengan kondisi global. Ketiganya saling terkait dan menempel pada kehidupan masyarakat. meski secara analitis terpisah tapi secara praktik terkait (Roy dkk. 2021: 384).

menjadi sekaligus menjadi aktor ekonomi? Awalnya saya merasa pertanyaan ini keliru. Bagaimana mungkin gerakan OMS yang melawan praktek ketidakadilan dan ketimpangan hasil dari bekerjanya kapitalisme dan neoliberal, justru memikirkan opsi pendanaan dengan cara yang kapitalistik? Tapi di sisi lain ada pertanyaan lain yang muncul dalam benak saya: lantas, bagaimana OMS dan agenda demokrasi bisa berkelanjutan tanpa ada dukungan sumber daya? Apakah bisa kita selalu mengandalkan pada semangat kesukarelaan dalam mendorong demokrasi?

Hadirin yang saya muliakan,

Mari kita petakan dulu sumber-sumber pembiayaan OMS di Indonesia. Setidaknya ada empat sumber: a) dari lembaga donor, b) dari iuran anggota (seperti serikat buruh), c) dari donasi individual tak terikat dan dari hasil mobilisasi publik yang bersifat incidental; e) dari sumber pembiayaan negara.

Terkait yang pertama, sumber dari lembaga donor internasional juga menurun dalam satu dekade terakhir di berbagai belahan dunia (Tandon dan Brown 2013), kecuali untuk isu krisis iklim. Krisis pendanaan ini mengubah relasi Masyarakat Sipil dengan negara dan dengan korporasi lembaga donor (Verbrugge dan Huyse 2018). Ada beberapa alasan mengapa penurunan dan krisis pendanaan ini terjadi. Salah satunya adalah peningkatan alokasi pendanaan untuk LSM yang berasal di negara-negara asal pendonor yang kebanyakan ada di Negara Utara. Data Human Rights Funding menunjukkan bahwa di tahun 2020, total alokasi bantuan untuk Kawasan Asia Pasifik hanya sebesar 3,3%, dibandingkan tahun 2016 sebesar 5,5% (HRFN 2024).¹⁰

Terkait yang kedua, sumber pembiayaan dari anggota seperti serikat buruh. Setiap bulan serikat pekerja memotong 1% gaji para buruh dan menggunakannya untuk memutar organisasi serikat. Saat ini

¹⁰ Untuk sektor di luar Hak Asasi Manusia, laporan OECD (2023) juga memperlihatkan tren penurunan alokasi anggaran Official Development Assistance (ODA), termasuk anggaran untuk Masyarakat Sipil.

jumlah tenaga kerja tetap terus menurun, yang berakibat turunnya pendanaan serikat. Model kedua ini adalah yang ideal.

Terkait sumber ketiga yakni donasi individual yang bersifat filantropis. Di negara lain sumber hidup OMS adalah donasi dari orang kaya. Para donator ini dikenal sebagai HNWI atau *High-Net-Worth Individual*, yakni orang yang memiliki aset kekayaan minimal 1 juta dollar. Merekalah donatur utama OMS seperti Greenpeace.¹¹ Dengan skala yang lebih kecil, di Amerika Serikat telah lahir inisiatif bernama “grassroots philanthropy”, atau “ordinary-people centered philanthropy” (Ruesga 2021: 455); dalam bentuk “giving circle” community (Eikenberry 2016).

Sementara itu, yang keempat, yang bersumber dari mobilisasi dana publik. Mobilisasi dana publik sangat massif di Indonesia dan kebanyakan bersifat kemanusiaan, keagamaan, dan karitatif. Orang Indonesia dikenal sebagai orang paling dermawan di dunia. Hasil Survei Indeks Kedermawanan Dunia (World Giving Index), selama 7 tahun berturut-turut, menunjukkan orang Indonesia adalah orang paling dermawan sedunia. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengumpulkan dana sebesar Rp 1 triliun pada tahun 2024. Di sini kita melihat, tingginya potensi penggalian dana publik di Indonesia. Tapi mengapa dana publik ini belum menjadi sumber pembiayaan alternatif OMS di Indonesia? Apakah ada kaitannya dengan ciri konservatif kelas kaya dan kelas menengah Indonesia yang lebih cenderung pro *status quo*? (Young dan Tanter 1990). Ataukah karena orang Indonesia sehari-harinya telah kelelahan karena besarnya kewajiban sosial sebagai bagian dari anggota Masyarakat.

Secara terbatas, sudah ada beberapa OMS yang telah melakukan mobilisasi dana publik (*crowdfunding*), seperti yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) melalui “Sahabat ICW” dan SAKTI (Sekolah Anti Korupsi). Isu anti-korupsi yang menjadi ciri ICW, dan mimpi menjadikan Indonesia bersih tanpa korupsi, mendorong donatur untuk menyumbang. Laporan Tahunan ICW tahun 2023 menyebutkan jumlah donasi publik yang terkumpul berjumlah

¹¹<https://www.greenpeace.org/international/about/values/>

lebih dari Rp 788 juta, atau sekitar 32,3% dari total Rp 2,4 miliar dana yang berasal dari lembaga donor yang mendukung ICW.¹² Sumber kelima akan saya gali di bawah ini.

Hadirin yang saya hormati,

Di tengah terus menurunnya sumber pendanaan dari lembaga donor internasional, OMS di Indonesia memiliki beberapa opsi. *Pertama*, mencari pembiayaan ke negara; *kedua*, mencari pembiayaan ke Masyarakat Ekonomi; *ketiga*, mencari pembiayaan ke arah dirinya sendiri yakni merancang sumber pembiayaan mandiri dalam bentuk unit usaha; dan *keempat* meradikalisasi gerakan berbasis kerelawanan. Saya akan menggali keempatnya sembari memetakan resiko yang menyertai.

Terkait pendanaan bersumber dari negara, dimotori oleh INFID, sekelompok OMS di Indonesia menginisiasi kelahiran “Dana Abadi Organisasi Masyarakat Sipil” di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2019.¹³ Ide Dana Abadi telah masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP 2025-2045), dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2025-2029). Peraturan presiden belum ditandatangani sampai sekarang.¹⁴ Saat ini, telah banyak juga OMS yang memanfaatkan skema Swakelola dari pemerintah dalam memutar roda organisasinya.

¹² Laporan Akhir Tahun Indonesian Corruption Watch 2023. Saya berterimakasih pada Danang Widiyoko atas masukan ini.

¹³ Skema Dana Abadi merujuk pada model yang ada di negara lain seperti di Estonia. Peluang OMS lain yang bersumber dari negara adalah skema Swakelola tipe 3, sesuai dengan Perpres No 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Sumber pendanaan OMS dari negara, akan membawa konsekuensi ciri dan watak gerakan OMS sendiri, dengan orientasi mendukung program pembangunan pemerintah, sebagaimana terjadi di era Orde Baru.

¹⁴ Belakangan, lahir skema negara di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam bentuk “Dana Indonesiania” yang menjadi sumber pembiayaan negara dalam bidang Pendidikan dan kebudayaan. Saya berterimakasih pada Dr Ken Setiawan yang telah menyampaikan masukan penting ini.

Opsi pembiayaan bersumber dari negara memiliki resiko yakni OMS akan berperan sebagai mitra pemerintah dalam mendukung program pembangunan. Opsi ini akan membawa OMS seperti model di era Orde Baru. Saat itu mereka disebut “LSM Pembangunan”, sebagai bagian dari strategi bernegosiasi dengan rejim politik (Eldridge 1996), dan terfokus pada peran transformasi sosialnya (Fakih 1995). Di Amerika Serikat, negara adalah sumber kegiatan OMS dalam bentuk koperasi, dan asosiasi,¹⁵ dan peran utamanya mendukung program pembangunan pemerintah (Avis 2022). Di Swedia, diinisiasi warga, format kelembagaan LSM di sana berbentuk koperasi dengan dananya juga bersumber dari negara. Beberapaanya fokus pada penyelesaian isu pengungsi dari Timur Tengah dalam integrasinya dengan pasar tenaga kerja (Campos 2022).

Opsi kedua terkait pendanaan bersumber dari korporasi atau Masyarakat Ekonomi.¹⁶ Ada dua model di sini. *Pertama*, aktivis masuk ke dalam sektor korporasi untuk mengawal agenda progresif, dan saya menyebutnya sebagai strategi “kompromi”; dan *kedua*, OMS mencari dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk pembiayaan kegiatannya. Terkait strategi pertama yang bersifat kompromi, meski tidak terkait langsung dengan pendanaan, Masyarakat Sipil mendorong

¹⁵ Ada 4 prinsip etik yang beroperasi di sini yakni fokus pelayan pada anggota, dan tidak semata-mata mencari untung; adanya manajemen yang otonom; pengambilan keputusan internal yang demokratis; dan pengutamaan orang dan bukan modal dalam distribusi pendapatan (Defourny and Develtere 1999:16). SE di Inggris kebanyakan berbentuk koperasi yang memberikan layanan dasar yang tidak dapat dilakukan oleh negara. Di sini, peran yang dilakukan SE mengisi kekosongan kelembagaan (*institutional void*) pasca Inggris mengadopsi kerangka neoliberal dan meminimalkan peran negara, termasuk dalam layanan dasar (Roy dkk. 2021: 381).

¹⁶ Terlibatnya korporasi dalam isu Pembangunan tidak bisa melepaskan diri dari respon atas kritik bahwa korporasi telah turut merusak alam dan menghasilkan ketimpangan dan ketidakadilan. Pertemuan United Nation’s Global Impact memang telah mendorong sektor swasta berperan aktif dalam pencapaian tujuan Pembangunan dalam MDGs (sekarang SDGs). Hasilnya adalah pada tahun 2009, ada 6.200 perusahaan swasta, dan 400 asosiasi korporasi di 135 negara yang menjadi bagian dari “Global Compact Initiative”. Mereka memiliki 4 fokus area: Hak Asasi Manusia, perburuhan, anti korupsi dan lingkungan hidup (Pausadela dan Cruz 2016)

penguatan aspek etis korporasi ini. Aktivis misalnya mendorong inisiatif forum perdagangan berbasis etik (*Ethical Trading Initiative and the Free Labour Association*). Aktivis menginisiasi EITI (*Extractive Industry Transparency Initiative*) yang mendorong transparansi di sektor industri minyak dan gas. Ada juga aktivis yang duduk satu meja dengan korporasi sektor farmasi dalam Global Alliance for Vaccines Initiatives, dan memikirkan bersama strategi layanan kesehatan yang efektif untuk komunitas miskin.

Kesemua ini merupakan bentuk dari peningkatan aspek etis yakni *corporate code of conducts* dalam kegiatan bisnis. Ia mencakup penerapan nilai yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup, nilai sosial yang mendorong tidak dilanggarnya hak manusia dan komunitas yang tinggal di wilayah operasi perusahaan, dan disertai dengan sistem monitoring global.¹⁷ Zadek (2021) menyebut praktik ini sebagai “soft governance web”, yakni model *governance* berciri informal, non-koersif, berbasis jaringan, bertujuan mendorong (secara sukarela) sektor korporasi untuk tunduk pada aturan global berbasis hak asasi manusia.

Model lain di sini adalah pemanfaatan dana dari korporasi untuk mendanai kegiatan OMS. Opsi ini sering dianggap aktivis sebagai sesuatu yang kontroversial. Banyak aktivis yang tidak nyaman dengan opsi ini, khususnya kalau pendanaan berasal dari korporasi yang

¹⁷ Di Indonesia, kajian tentang peran korporasi dalam urusan publik lebih banyak terkait dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*), sebuah skema pembiayaan sosial oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, biasanya terkait dengan eksternalitas yang telah dihasilkan dari kegiatan perusahaan, seperti kerusakan lingkungan. Haefner mendeteksi periode awal tahun 2000an sebagai “Gerakan CSR”. Kajian Rosser dan Edwin (2010) menunjukkan bahwa regulasi yang menghasilkan CSR (UU No 4/2007) adalah bentuk dan hasil pertarungan antara aktor pengusaha yang didukung politisi, masyarakat lokal dan aliansi dengan masyarakat sipil, dan kepentingan politisi yang mendukung pengusaha, khususnya terkait dengan CSR yang bersifat sukarela (*voluntary*) ketimbang kewajiban (*mandatory*). Di sini kita bisa mendeteksi bagaimana Yayasan Korporasi dan CSR berciri neoliberal karena sifat bantuan yang karitatif dan tidak menyentuh persoalan struktural. Poin utama yang ingin saya garis bawahi adalah masuknya aktor korporasi dalam isu-isu yang menjadi ranah Masyarakat Sipil.

memiliki rekam jejak merusak lingkungan dan abai terhadap prinsip HAM. Forum rutin Indonesia Civil Society Forum (ICSF) misalnya banyak dikritik aktivis karena dukungan pendanaan dari sebuah yayasan milik korporasi yang dianggap telah turut menghancurkan alam dan lingkungan hidup melalui kegiatan penambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit.

Yang perlu dicatat di sini juga adalah korporasi membuat sendiri unit yang kegiatannya menyerupai kegiatan yang biasa dilakukan oleh Masyarakat sipil yakni pemberdayaan Masyarakat lokal. Korporasi mendirikan “yayasan korporasi”, atau “Corporate Funding” (CF)¹⁸ meniru apa yang korporasi di tingkat global. Bill Gates mendirikan Gates Foundation, dan mengalokasikan dana sebesar 35 miliar dollar pada tahun 2024. Di Indonesia, hampir semua perusahaan besar memiliki yayasan seperti Putra Sampoerna, Eka Tjipta, Bakrie, Indika, H Kalla, Adaro dll. Yayasan Tanoto di Indonesia mengalokasikan dana sebesar Rp 535 milyar pada tahun 2023. CSR dan CF juga ini merupakan strategi baru korporasi untuk berperan di isu sosial di tengah tekanan pada mereka untuk berkontribusi pada isu sosial yang telah berlangsung sejak awal tahun 2000an. Ia sekaligus bentuk kompetisi global yang telah memiliki ciri baru yakni taap pada aspek etis. Di

¹⁸ Regulasi tentang yayasan lahir pada 2001 yang memformalkan peran ormas dalam banyak kegiatan sosial termasuk dalam memobilisasi dana publik, dan kemudian dimanfaatkan juga oleh korporasi. Beberapa tahun berikutnya regulasi tentang CSR lahir di 2007. Keduanya kemudian memperkuat dan peran korporasi dalam bentuk CF dalam arena Masyarakat Sipil. Selain itu, beragam skema pendanaan di tingkat global yang memasukan sektor filantropi, menjadikan posisi CF semakin mendapat legitimasi (Westhues 2006). Filantropi Indonesia misalnya adalah bagian dari SDGs Philanthropy Platform (Hartnell, 2020). Kajian Pratt (2016: 528) juga menunjukkan tren pergeseran lembaga donor dari strategi mendorong masyarakat sipil yang dinamis bersama dengan nilai-nilai demokratis yang dikawal oleh OMS, menjadi fokus pada jasa layanan *not-for profit*, yang dikerjakan oleh OMS. Di sini OMS menjadi perluasan peran pemerintah dalam melakukan layanan publik. Seiring dengan itu, dari segi pendanaan, telah lahir gerakan “new philanthropy” di berbagai belahan dunia dengan ciri “embedded within larger social status”. Ruesga (2021) berargumen bahwa praktik ini merupakan kritik terhadap model lembaga filantropi yang klasik yakni individual yang menuliskan cek donasi untuk organisasi sosial, dan bersifat *top-down*, dan pembelanjaan ditentukan oleh pemberi donasi.

Indonesia sendiri, kajian kritis menunjukkan bahwa CSR belum bersifat sistematis. Sumber pendanaan CSR misalnya mengalami politisasi, dan digunakan untuk pendisiplinan warga lokal melalui elite-elit setempat (Rosser dan Edwin 2010).

Hadirin yang berbahagia,

Saya ingin kembali pada pemikiran Karl Polanyi yang telah saya singgung di atas praktek ekonomi yang *embedded* dengan praktek sosial dan politik. Dengan kerangka ini saya merenungkan opsi kemandirian dan keberlanjutan OMS *menjadi aktor ekonomi*. OMS mendirikan unit bisnis, dalam rangka mendorong diversifikasi pendanaan dan keberlanjutan, sembari tetap merawat gerakan sosial. “Sembari mendorong gerakan sosial” adalah kata kunci penting agar opsi ini tidak menjebak OMS justru menjadi agen kapitalis dan semata berorientasi pada *profit making*.

Dalam literatur secara generik opsi ini diberi nama sebagai “usaha sosial” atau *social enterprises* (SE).¹⁹ Kajian kontemporer menyebutkan bahwa perusahaan sosial merupakan bentuk pertemuan, *embeddedness*, antara prinsip pasar yang berorientasi pada *profit making*, dengan praktik redistribusi dan resiprositas yang berorientasi pada *civic making*. Ia kemudian menghasilkan model organisasi campuran atau *hybrid* (Defourny and Nyssens, 2006: hal 10–11). Dalam literatur, Perusahaan Sosial merepresentasikan generasi baru Masyarakat Sipil yang berupaya memecahkan masalah sistematis yang dihadapi dunia saat ini (Nicholls 2011), termasuk kelangkaan pendanaan. Model perusahaan sosial merakit persoalan lama menjadi hal baru, sembari meretas batas sektoral, dan struktur organisasi. Lembaga donor pun telah secara aktif mendorong hal ini sebagaimana berlangsung di banyak negara Selatan. Tujuannya adalah mendorong keberlanjutan OMS dengan memperkuat kemampuan keuangannya.

¹⁹ Perusahaan Sosial (Social Enterprise/SE) adalah ide lama tapi kembali populer di awal tahun 1990an ketika Universitas Harvard meluncurkan program ‘Social Enterprise Initiatives’ pada tahun 1993 (Spicer 2019).

Ikhtiar ini telah banyak dilakukan oleh OMS di Indonesia, tapi masih bersifat terbatas, dan karenanya perlu diperluas. ICW misalnya memiliki unit layanan berorientasi pada *profit making*. Beberapa LSM berbasis di Yogya memiliki bisnis warung kopi.²⁰ PKBI telah lama memiliki klinik layanan kesehatan reproduksi bagi publik yang keuntungannya menjadi satu alternatif pendanaan. Tentu saja skema ini tidak sepenuhnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan rutin OMS termasuk biaya *overhead cost* nya.

Koperasi adalah salah opsi model usaha sosial yang dapat diadopsi oleh OMS. Contoh yang sudah berhasil adalah Credit Union (CU) Pancur Kasih di Kalimantan Barat, yang sekarang bernama Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Pancur Kasih. Asetnya pada tahun 2023 sebesar lebih dari Rp 3,4 triliun, dengan jumlah anggota lebih dari 200 ribu. Koperasi ini adalah koperasi simpan pinjam.²¹ Belakangan telah ada inisiasi menggunakan model koperasi di kalangan OMS dalam konteks memperkuat gerakan sosial. Koperasi Perumahan yang didirikan oleh komunitas warga anggota Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) di Jakarta adalah salah satunya. Ia didirikan dalam upaya melindungi keamanan bermukim bagi warga berpenghasilan rendah di Jakarta (Sugandhi 2022, Batubara dkk. 2024), sekaligus memiliki unit pendapatan yang dapat digunakan oleh para anggotanya.

Dari jurusan yang berbeda di luar dunia aktivis, kita telah melihat generasi muda Indonesia, mendirikan prototipe Perusahaan Sosial di beragam sektor. Secara tidak langsung mereka mengkombinasikan antara kegiatan *profit making*, dan *civic making*.

²⁰ <https://www.combine.or.id/2022/12/09/tren-fundraising-lsm-di-yogyakarta-dari-bisnis-kedai-kopi-hingga-penginapan/>. Kajian lain tentang ini dipaparkan oleh Dos Santos dkk, (2019), Smith dan Darco (2014).

²¹ Sebagai institusi sosial dengan ribuan anggota, koperasi rentan dimasuki kepentingan politik praktis. Kajian Kurniawan dan Rahmawati (2018) menggali “politisasi” (dalam bentuk masuknya para pegiat ke arena politik formal), termasuk dominasi kelompok Dayak di CU, dan “ekonomisasi” (dalam bentuk bekerjanya logika neoliberal seperti efisiensi dan produktivitas).

Model bisnis mereka melibatkan penguatan ekonomi kelompok marjinal, termasuk kelompok perempuan dan kelompok disabilitas.²²

Opsi keempat adalah meradikalisasi semangat kerelawanan warga negara. Opsi ini memiliki prasyarat misalnya terfokus pada kelompok warga yang memiliki ciri “kesementaraan”, seperti mahasiswa dan pelajar (Weiss dan Aspinall 2012), atau bagi warga yang tidak bersandar pada dunia Masyarakat Sipil secara profesional. Gerakan kesukarelaan pun juga memiliki keterbatasan: ia bersifat jangka pendek, dan spontan. Agenda advokasi isu-isu struktural membutuhkan sumberdaya yang cukup untuk penelitian berbasis data, dan mengelola jaringan sosial secara luas. Selain itu, kesadaran hak Z akan hak nya sebagai pekerja, latar belakang ekonomi dari keluarga kelas pekerja, dan beragamnya kolektif yang lahir di kalangan mereka, menghasilkan kesulitan “supply” mahasiswa untuk gerakan kerelawanan.

Hadirin yang saya muliakan,

Opsi mendirikan sayap usaha sosial, dalam hemat saya merupakan upaya mengembalikan semangat koperasi sebagai alat gerakan sebagaimana yang dilakukan para juragan batik di Surakarta. Ia merupakan **salah satu** alternatif diversifikasi sumber pembiayaan OMS di tengah badai krisis pendanaan yang dihadapi OMS saat ini. Dari pidato ini, Saya mengajak kita semua, teman-teman Masyarakat sipil untuk mendalami dan mempertimbangkan opsi kemandirian OMS ini. Opsi ini pun memiliki resiko, khususnya di tengah persaingan dan fragmentasi antar OMS yang sangat tinggi. Selain itu, opsi ini rasanya “kurang radikal”, dan OMS seperti menjadi “antek kapitalis”, dan kemungkinan tergelincir dari ideologi gerakan sosialnya. Opsi ini memiliki prasyarat dasar yakni ***profit making adalah instrumen civic making***.

²² Sebuah produk fashion berbasis di Bandung mengombinasikan kegiatan bisnis dengan kegiatan pemberdayaan kelompok perempuan. Kapas yang digunakan dalam produksi garmen berasal dari petani kapas dari berbagai lokasi di Indonesia. Sebuah produk coklat lokal berbasis di Lampung, memproduksi coklat dengan memberdayakan petani kecil coklat.

Hal penting yang dapat kita pelajari dari apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir pada OMS adalah kebutuhan untuk beradaptasi. Krisis ini akan mengubah lanskap OMS Indonesia dan di dunia ke depan. OMS mungkin akan mengalami proses “decentering” (penurunan derajat sentralisasi), dan pengecilan skala. Gerakan ke depan mungkin akan jauh lebih plural, dengan skala mikro karena keterbatasan sumber pendanaan. OMS Indonesia kemungkinan membutuhkan reorientasi diri pada target dan program yang didorong. Kalau dulu pembiayaan berskala besar dari lembaga donor dapat menciptakan program berskala nasional, kemungkinan akan lahir kebutuhan *scaling-down* aktivitas lebih bersifat lokal.

Yang menjadi agenda utama strategis OMS proses berjejaring membangun jembatan antar OMS dalam format “ekosistem”. Di sini, kematian OMS bukanlah opsi. Karena matinya OMS bisa menandai matinya demokrasi. Pencarian pendanaan alternatif OMS adalah bagian dari merawat demokrasi di Indonesia dan bukan dimaksudnya transformasi OMS menjadi entitas yang berkawan dengan kapital tapi melawan warga yang dibelanya.

Hadirin yang saya muliakan,

Jabatan Guru Besar ini telah melalui proses panjang yang melibatkan begitu banyak pihak, individu, dan kerja kolektif. *It takes a village to be a woman academic professor*. Kepada mereka ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan dari lubuk hati saya yang paling dalam.

Kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI, Rektor UGM, Senat Akademik, Dewan Guru Besar, Senat Fakultas, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, para wakil dekan, dan ketua serta sekretaris departemen, saya ucapkan terima kasih atas segenap dukungannya dalam proses pengajuan jabatan guru besar ini. Prof Erwiza Erman dari BRIN juga berkenan hadir hari ini. Juga Prof Ed Aspinall yang terbang langsung dari Canberra.

Kepada *reviewer* naskah ini Prof Haryanto dan Prof Pratikno, dua guru saya, saya ucapkan terimakasih atas masukan berharganya.

Prof Edward Aspinall, dan Dr Ken Setiawan meluangkan waktu memberi masukan berharga atas ide awal pidato ini.

Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) adalah rumah tempat saya tumbuh dan berkembang. DPP merupakan ruang akademik dan sosial yang telah memfasilitasi kami melakukan pertukaran ide/gagasan dengan semangat solidaritas sosial yang tinggi. Saya beruntung bisa menjadi bagian dari rumah ini. Kepada para guru saya: Pak Josef Riwu Kaho, almarhum Prof Afan Gaffar, almarhum Prof Riswandha Imawan, almarhum Prof mas Cornelis Lay, almarhumah Bu Sri Djoharwinarli, salam hormat saya yang sedalam-dalamnya da semoga arwah mereka tenang di sisi Tuhan. Bersama Mas Tik, almarhum Mas Conny adalah mentor pertama saya saat bergabung sebagai asisten peneliti di jurusan. Saya juga berterimakasih pada guru saya Pak Mashuri, Bu Ratna, Mas Purwo, Mas BP (alm), Mas Ari Dwipayana, dan Mas Kadept Gaffar. Terimakasih saya sampaikan pada kolega-kolega muda termasuk Mas Mada, Mas Sekdept Ayik, Mas Dekan Fisipol Wawan, Mas Nanang, Mbak Aziz (juga sebagai ketua panitia pengukuhan ini), Mas bupati Mas Sigit, alm Mas Acong, Mas Bayu, Mas Hanif, Mbak Evi, Joash, Indah, Devy, Mahesti, dan Alfath. Para warga DPP yang sedang bersekolah di luar negeri (Nova, Pipin, Wigke, Ina, Arga, Ashari, Djindan, dan Primi) memfasilitasi zoom meeting dan memberi masukan berharga pada draf awal naskah ini.

Ucapakan terimakasih saya untuk rekan-rekan di departemen yang mengurus administrasi (Ocha, Rina, Mas Rudi), staf keuangan (Mbak Aji, Ari dan Eka), staf peneliti, publikasi dan media Research Centre for Politics and Government (PolGov) Afifa, Ardiman, Tia, Farha, Ayu dan Lintang, dan semua awak tim Pares (yang dikomandani Obed).

Para guru saya di Amsterdam Institute for School for Social Research, almarhum Prof Mario Rutten, Prof Gerry van Klinken, Prof Henk Schulte Nordholt, Dr Gerben Noteboom, dan Prof Pujo Semedi. Para kolaborator riset kolaborasi departemen dan PolGov: Prof Edward Aspinall, Prof Ward Berenschot, Prof Meredith Weiss, Dr Rachael Diprose, Dr Ken Setiawan, Prof Olle Törnquist, Prof Anders Uhlin, Dr Astrid Norén-Nilsson, Dr Emma Baulch, Dr Ian Wilson, dan Dr Michele Kooy.

Sahabat-sahabat saya yang telah menemani, memberi semangat tanpa jeda, dan selalu percaya pada kemampuan saya: Evi Mariani, Poppy Ismalina, dan Yulia Indrisari. Pesan WA pendek atau pesan IG selalu menjadi sumber semangat dan kepercayaan diri saya.

Teman-teman sekaligus kolaborator kerja dalam beberapa tahun terakhir: teman-teman Yappika (Mbak Iko, Hendrik, Munawir, Riza), Mbak Yenni dari INKLUSI, teman-teman ARC UI (Dr Inaya Rakhmani, Dr Diatyka Widya Yasih, dkk), teman-teman Yayasan Asia/USAID ERAT (Erman Rahman dan tim).

Teman-teman gerakan warga seperti Jaringan Rakyat Miskin Kota, JRMK (Mbak Wardah, Gugun, Mbak Eny, Mbak Wati, dll), Serikat Pekerja Metal Indonesia di Bekasi (Bang Obon, Pakde Kamto, Mas Parno, Bang Oji, Mas Supri, Teh Ika dll), Paguyuban Kali Jawi (Mbak Ainun dkk), dan Arkom Institute (Mas Yuli, Ishol, Nukie, Rani, Evy, Ade, dll). Kepada mereka Saya ucapkan terimakasih sudah memberi kesempatan belajar menimba ilmu, dan membumikan apa yang ada dalam buku pelajaran.

Keluarga saya berperan sangat sentral sampai saya mencapai titik ini. Pertama adalah kedua orang tua saya yang telah lebih dulu meninggalkan kami. Papa Gurdi dan Mama Djusleily memiliki filosofi pendidikan yang sangat modern untuk generasi mereka: membiarkan kami anak-anaknya memilih apa pun yang kami sukai disertai bertanggung jawab atas pilihan tsb. Tanpa mereka, saya tidak akan berdiri di sini. Bersama suami saya, Mama membantu menjaga Randu yang masih bayi, saat saya menempuh pendidikan S3 di Belanda. Kakak dan adik saya Aulia Damayanti dan Annisa Muharami juga bagian dari tim gotong royong mama mengasuh randu. Mereka berdua adalah juga sumber kekuatan saya setelah mama-papa meninggalkan kami. Anggota tim gotong royong lain adalah Keluarga Pasar Minggu (Kak Idham, Adib, Yasmin, dan Faiz), dan keluarga Nisa dan Medi; kepada mereka semua saya ucapkan terimakasih, keluarga Karangmojo, Bapak Sadija Ahmad Thohir, almarhumah Ibu Suciati, Mas Yeni dan almarhumah Mbak Atik, Mas Udin, Tante Diah dan 2 jagoan (Aji dan Adana). Tanpa mereka saya tidak akan bisa berdiri di sini.

Terakhir, suami dan anak saya tercinta Awali Saeful Thohir dan Randu Tuwuhan Angin. Mereka adalah *supporter* saya setiap hari. Suami saya membaca berkali-kali versi pidato ini dan membantu menajamkan poin-poin utama pidato ini. Kasih sayang dan toleransi tinggi mereka pada aktivitas sehari-hari saya, pada wajah saya yang sering jutek, adalah *everyday support of a family can give*, dan sumbangan tak ternilai bagi perjalanan karir saya. Di balik pencapaian seorang professor perempuan, ada suami dan anak yang selalu kebersamainya (juga kucing kami si Item).

Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa gelar guru besar ini bukan untuk saya pribadi, melainkan untuk generasi muda dosen perempuan di Departemen Politik Pemerintahan, dan kolega-kolega muda perempuan di Fisipol UGM. Di tengah begitu banyaknya peran yang kita lakukan (peran produktif dan kerja-kerja keperawatan), gelar ini tetap mungkin diraih. Saya menutup pidato ini dengan pantun: “Ubur-ubur ikan lele, saya sudah gebe le”. *Alhamdulillah rabblil alamin.*

Wassalamualaikum wr wb.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Hamid (n.d), “Mobilisasi Sumber Daya Untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Pembelajaran dan USAID-MADANI”. Jakarta USAID, fhi360.
- Adloff, F. 2021. “Capitalism and Civil Society Revisited or: Conceptualizing a Civil, Sustainable and Solidary Economy.” *International Journal of Politics, Culture, and Society*, 34:149-159.
- Antlöv, H, Brikenhoff, D.W., dan Rapp, E. 2010. “Civil Society Capacity Building for Democratic Reform: Experience and Lessons from Indonesia.” *Voluntas* 2: 417-439.
- Aspinall, E. 2005. *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Redwood, CA: Stanford University Press.
- Avis, W. 2022. *Funding Mechanisms to Local CSOs*. K4D. Birmingham: University of Birmingham.
- Batubara, B., Guntoro., Fauzi, NF., Herlily., dan Adianto, J. 2024. “Land Occupation, Re-occupation, Cooperative: Commune Formation by Jakarta’s Urban Poor”. *Agrarian South: Journal of Political Economy*. Vol 13, Issue 1, March: 89-109.
- Benton, A., dan Monroy Alvaro. 2004. *Business Approach for the Reproductive Health NGO*. Commercial Market Strategies. https://shopsplusproject.org/sites/default/files/resources/973_file_35_Business_Approaches_for_the_Reproductive_Health_NGO.pdf
- Carrol, T., dan Jarvis, D.S.L. 2015. “Markets and Development: Civil Society, Citizens and the Politics of Neoliberalism.” *Globalizations* 12, no. 3: 277-280.
- Campos, M. J. Z. 2024. “The Expansion of Alternative Forms of Organizing Integration: Imitation, Bricolage, and an Ethic of Care in Migrant Women’s Cooperative.” *Journal of Business Ethics* 194: 809-824.
- Chandrakirana, K., Perdana, A., dan Andriyanti, Y.D. 2022. MADANI Programmatic Study on Resource Mobilization and Financial

- Sustainability of Local CSOs in Indonesia. <https://www.madani-indonesia.org/wp-content/uploads/2022/08/Programmatic-Study-on-Resource-Mobilization-Financial-Sustainability.pdf>
- Cohen, J., dan Arato, A. 1994. *Civil Society and Political Theory*. Cambridge: the MIT Press.
- Davies, B. 2013. "Financial Sustainability and Funding Diversification: The Challenge for Indonesian NGOs. "International Journal of Voluntary and Nonprofit Organisations 5: 1-26.
- Defourny, J. dan Develtere, C. 1999. *From Third Sector to Social Enterprise*, London Routledge.
- Defourny, J. dan Nyssens, M. 2006. "Defining Social Enterprise", dalam Nyssens, M (ed), *Social Enterprises at the Crossroad of Market, Policies and Civil Society*, Routledge, Abington, Oxon: 3-36.
- Diamond, L. 1999. *Developing democracy: Towards Consolidation*. John Hopkins University
- Dos Santos, Luciane Lucas., dan Swati Banarjee. 2019. "Social Enterprise: Is It Possible to Decolonise This Concept?" dalam Philippe Eynaud, Jean-Louis Laville, Luciane Lucas dos Santos, Swati Banarjee, Flor Avelino, and Lars Hulgård (eds). *Theory of Social Enterprise and Pluralism Social Movements, Solidarity Economy and the Global South*, hal 3-43. New York: Routledge.
- Eldridge, P. 1996. "Development, democracy and non-government organizations in Indonesia", *Asian Journal of Political Science* 4, 1 hal 17-35.
- Eikenberry, A. 2006. "Giving Circles: Growing Grassroots Philanthropy". *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, vol. 35, no. 3, September, hal 517-532
- Eka Tjipta Foundation. 2024. *Eka Tjipta Foundation*. <https://ekatjipta.org/id/beranda/>
- Fakih, M. 1995. The role of Nongovernmental Organization in Social Transformation. Disertasi Doktoral, University of Massachusetts at Amherst, Amerika Serikat. <https://www.proquest.com/openview/15094e218dad55e444b9a29257d98456/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>

- Faizi, L. 2024. Daftar aset dan kekayaan Muhammadiyah, Organisasi Islam yang merayakan Milad ke-112. Sindonews.com 18 November.
<https://nasional.sindonews.com/read/1490273/15/daftar-aset-dan-kekayaan-muhammadiyah-organisasi-islam-yang-merayakan-milad-ke-112-1731921082#>.
- Fauzia, A. 2017. Penolong Kesengsaraan Umum: The Charitable Activism of Muhammadiyah During the Colonial Period. *South East Asia Research*, Vol 25 (4): 379-394.
- Fernandes, A. 2024. “Demi Demokrasi yang lebih baik, sudah waktunya pemerintah mengggagas dana abadi untuk kelompok masyarakat sipil.” *The Conversation*, Maret 21.
<https://theconversation.com/demi-demokrasi-yang-lebih-baik-sudah-waktunya-pemerintah-mengggagas-dana-abadi-untuk-kelompok-masyarakat-sipil-224374>
- Greenpeace. 2023. Internation Annual Report 2023 sumber:
https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2024/06/cdf96cad-greenpeace-international-combined-financial-statement-2023.pdf?_gl=1*1m8voif*_up*MQ..*_ga*MTgxNzA0MDU4Mi4xNzM4MTIwMzU1*_ga_94MRTN8HG4*MTczODEyMDM1Ni4xLjAuMTczODEyMDU3OC4wLjAuMTc1NzQ3MjAx*_ga_0CCB1GTVV6*MTczODEyMDM1NS4xLjEuMTczODEyMDU3OC4wLjAuMA..*_ga_99CSX66YC1*MTczODEyMDM1NS4xLjEuMTczODEyMDU3OC4wLjAuMA.
- Hartnell, C. 2020. *Philanthropy in Indonesia: A Working Paper*. Philanthropy for Social Justice and Peace, in association with Alliance, Filantropi Indonesia, and WINGS. <https://researchinstitute.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2020/02/Philanthropy-in-Indonesia-Feb-2020.pdf>
- Hadiz, V., dan Robison, R. 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market*. Routledge.
- Hadiwinata, B.S. 2003. *The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing the Movement*. Taylor and Francis.

- Harvey, D. 2005. *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Hoelman, M. B. 2021. *Dua Dekade Bantuan Pembangunan dan Peran Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia: Dana Publik Solusi Untuk Keberlanjutan*. Laporan Penelitian. Penabulu Foundation, Evolve, European Union.
<http://researchinstitute.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2022/01/DANA-PUBLIK-Solusi-untuk-Keberlanjutan-LSM.pdf>
- HRFN (Human Rights Funders Network). 2024. *Advancing Human Rights Annual Review of Global Foundation Grant Making*. Human Rights Funders Network.
<https://www.hrfn.org/resources/advancing-human-rights-2020-key-findings/>.
- Indonesian Corruption Watch (ICW). 2023. Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen.
- Katadata. 2023. Ini Jumlah Ormas LSM di Indonesia hingga 2023. Sumber:
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/676152c5d673d/ini-jumlah-ormaslsm-di-indonesia-hingga-2023>
- Kurniawan, N.I Indra dan Rahmawati, D. 2018. "Framing Needs, Politicising Cooperatives: Credit Union in West Kalimantan in a Context of Market Economy." Dalam *The Politics of Welfare: Contested Welfare Regime in Indonesia*, edited by Wawan Mas'udi, dan Cornelis Lay, 109-133. (Jakarta: Yayasan Obor, PolGov UGM dan Universitas Oslo.
- Mietzner, M. 2013. "Fighting the hellhounds: Pro-democracy activists and party politics in post-Suharto Indonesia". *Journal of Contemporary Asia* 43, 1: 28–50.
- Nicholls, A. 2011. "Social Enterprise and Social Entrepreneurs." *The Oxford Handbook of Civil Society*, diedit oleh Michael Edwards, 80-92. Oxford: Oxford University Press.
- Niras. 2022. *Final Report BUILD Developmental Evaluation*.
<https://www.fordfoundation.org/news-and-stories/stories/what-weve-built-with-build/>

- Norén-Nilsson, A., Savirani, A., dan Uhlin. 2023. *Civil Society Elites Field Studies from Cambodia and Indonesia*. Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies (NIAS) Press.
- Organization for Economic and Cooperation Development (OECD). 2023. *Development Cooperation Report: Debating the Aid System*. OECD
- Pousadela, I. M., dan C, Anabel. 2016. “The Sustainability of Latin American CSOs: Historical Patterns and New Funding Sources.” *Development in Practice* 26, no.5: 606-618. DOI: 10.1080/09614524.2016.1188884.
- Pratt, B. 2016. “Special Issue Overview: Civil Society Vulnerability.” *Development in Practice* 26, no. 5: 527-531.
- Tandon, R., dan Brown, D. L. 2013. “Civil Societies at Crossroads: Eruptions, Initiatives, and Evolution in Citizen Activism.” *Development in Practice* 23, no. 56-6: 601-608. DOI: 10.1080/09614524.2013.800842
- Rosser, A., dan Edwin, D. 2010. “The Politics of Corporate Social Responsibility in Indonesia.” *The Pacific Review* 23 no. 1: 1-22. DOI: 10.1080/09512740903398314.
- Roy, M. J., Dey, P., dan Simon, T. 2021. “Re-embedding Embeddedness: What is the Role of Social Enterprises in Promoting Democracy and Protecting Social Rights?” *Social and Enterprise Journal* 17, no. 3: 379-397.
- Ruesga, G Albert. 2011. “Civil Society and Grassroots Philanthropy.” Dalam *The Oxford Handbook of Civil Society*, diedit oleh Michael Edwards, 455-465. Oxford: Oxford University Press.
- Prasetyo, Stanley Adi., Priyono, AE., dan Olle Törnquist. 2003. *Indonesia's Post- Soeharto Democracy Movement*. Jakarta: DEMOS.
- Savirani, A dan Törnquist, O. 2015. *Reclaiming the State: Overcoming Problems of Democracy in Post-Soeharto Indonesia*. Yogyakarta: Polgov Press.
- Shills, E. 1991. “The virtue of civil society”, *Government and Opposition* Vol 26, No. 1

- Shiraishi, T. 1990. *An Age in Motion: Popular Radicalisation in Java 1912-1926*. Cornell University Press.
- Smith, W., dan Darko, E. 2014. *Social Enterprise: Constraints and Opportunities—Evidence from Vietnam and Kenya*. ODI. www.odi.org/publications/8303-social-enterprise-constraintsopportunities-evidence-vietnam-kenya
- Spicer, J., Kay, T., dan Ganz, M. 2019. “Social Entrepreneurship as Field Encroachment: How a Neoliberal Social Movement Constructed A New Field.” *Socio Economic Review* 17, no. 1: 195-227.
- Sugandhi, A. T. 2022. “Belajar dari Rakyat Miskin Jakarta: Membangun Koperasi Mewujudkan Perumahan Kolektif.” *Project Multatuli*, Juli 8. <https://projectmultatuli.org/belajar-dari-rakyat-miskin-jakarta-membangun-koperasi-mewujudkan-perumahan-kolektif/>
- Tanoto Foundation. 2019. Tanoto Foundation. <https://www.tanotofoundation.org/id/tentang-kami/>
- Tanter, R., dan Young, L (Eds). 1990. *The Politics of Middle Class in Indonesia*. Melbourne, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
- Taylor, J. 2016. “Crises in Civil Society Organisations: Opportunities for Transformation.” *Development in Practice* 26, no.5: 663-669. DOI: 10.1080/09614524.2016.1189878.
- The Telegraph. 2025. Trump freezes foreign aid under ‘America First’ policy, 25 Januari. Sumber: <https://www.telegraph.co.uk/us/politics/2025/01/25/trump-freezes-foreign-aid-under-america-first-policy/>
- Törnquist, O., Webster, N., dan Stokke, K. 2009, *Rethinking Popular Representation*. Palgrave
- Uhlin, A. 1997. *Indonesia and the “third wave of democratization”*: *The Indonesian pro democracy movement in the changing world*. St Martin Press.
- Verbrugge, B., dan Huyse, H. 2018. Donor Relationships with Development CSOs at Cross-Roads. A Comparative Study of Changing Funding Realities in, 6.

- Warburton, E., dan Aspinall, E. 2019. Explaining Indonesia's Democratic Regression. *Contemporary Southeast Asia*. Vol 41 No 2 (August): 255-285.
- Weiss, M., dan Hansson, E. 2023. "Civil Society in Politics and Southeast Asia in Civil Society: Conceptual Foundations." Dalam *Routledge Handbook of Civil and Uncivil Society*, diedit oleh Meredith Weiss dan Eva Hansson, 1-23. Routledge.
- Weiss, M., dan Aspinall, E. (eds.) (2012). *Student activism in Asia: between protest and powerless*. University Minnesota Press.
- Westhues, M. 2006. "Corporate Foundations: Their Role for Corporate Social Responsibility." *Corporate Reputation Review* 9, no. 2: 144–153. DOI:10.1057/palgrave.crr.1550019
- World Giving Index 2024, Global Trends in Generosity. https://www.cafonline.org/docs/default-source/inside-giving/wgi/wgi_2024_report.pdf
- Zadek, S.2011. "Civil Society and the Market." Dalam *The Oxford Handbook of Civil Society*, diedit oleh Michael Edwards, 428-441. Oxford University Press.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Amalinda Savirani
 Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Januari 1974
 Pekerjaan : Dosen
 NIP : 197401282002122002
 Pangkat dan Golongan : IV B/Lektor Kepala
 Alamat kantor : Departemen Politik dan Ilmu Sosial dan
 Ilmu Politik, Universitas Gadjah
 Alamat rumah : Jl Garuda Gg Turonggo II No 511 Rt
 11/41 Jaranan, Banguntapan Bantul, DI
 Yogyakarta 5519

Keluarga

Suami : Awali Saeful Thohir
 Anak : Randu Tuwuhan Angin

Riwayat Pendidikan

2015 : PhD, Amsterdam Institute for Social Science Research,
 Universiteit van Amsterdam, Belanda.
 2004 : MA, International School for Humanities and Social Science,
 Universiteit van Amsterdam, Belanda.
 2000 : Sarjana Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL,
 UGM.

Riwayat Pekerjaan

2004 – sekarang : Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan,
 FISIPOL, UGM
 2023 – sekarang : Kepala Research Center for Politics and
 Government (PolGov), Departemen Politik dan
 Pemerintahan, FISIPOL, UGM.
 2022 – 2023 : Kepala Prodi S3 Ilmu Politik
 2015 – 2022 : Kepala departemen, Departemen Politik dan
 Pemerintahan, FISIPOL, UGM.
 2005 – 2006 : Sekretaris jurusan Ilmu Pemerintahan

2000 – 2002 : Asisten peneliti di Jurusan Ilmu Pemerintahan,
FISIPOL, UGM

Publikasi (buku)

1. Aspinall, Edward and **Amalinda Savirani** (eds) (2024), *Governing Urban in Indonesia*, ISEAS Singapore.
2. Savirani, Amalinda and Ken Setiawan (eds) (forthcoming 2025), *Human Rights in Southeast Asia*, Routledge.
3. Savirani, Amalinda (2024) (ed), *Politik Gender di Indonesia*, PolGov Press
4. **Savirani, Amalinda**; Wijanto Hadipuro dan Dias Prasongko (2024) (eds), *Matinya air kami: Gerakan Sosial*, Yogyakarta, UGM Press.
5. Norén-Nilsson, Astrid; **Amalinda Savirani**, and Anders Uhlin (2023), *Civil Society Elites: Field Studies from Cambodia and Indonesia*, NIAS Press.
6. Savirani, Amalinda (2020), *Menerabas Batas, Memanen Harapan: Sekolah Politisi Muda*. Yogyakarta, Yayasan Satunama.
7. Kurnia, Novi; dan **Amalinda Savirani** (eds) (2020), *Big Data Untuk Ilmu Sosial: Antara Metode Riset Dan Realitas Sosial*, Yogyakarta, UGM Press.
8. Savirani, Amalinda and Olle Törnquist (2015) *Reclaiming State. Overcoming Problems of Democracy in Indonesia*. Yogyakarta, PolGov Press.

Artikel Jurnal

1. Indriany, Ika., Irwan, Andi Ilmi., **Savirani, Amalinda.**, Jayadi, Suparman (Forthcoming 2025), “In women we trust: Female brokers in Indonesian village governance”, *South East Asia Research (SEAR)*, SOAS University of London.
2. Savirani, Amalinda (2023), “University Curricula and Student Movement in Indonesia: “Gejayan Memanggil” Protest in Yogyakarta”, *Journal of Governance* Volume 8 Issue 3, September 2023 (367-383).

3. Savirani, Amalinda dan Indah Surya Wardhani (2022), “Local Social Movement and Local Democracy: Tin and Gold Mining in Indonesia”, *South East Asia Research*, vol 30, issue 4.
4. Savirani, Amalinda; Devanta Rafiq dan Emma Baulch (2022). “Shariah Cooperative and Mosque Ecosystem: The Devolution of Halal Entrepreneurship in Indonesia”, *Asian Studies Review* <https://doi.org/10.1080/10357823.2022.2134296>.
5. Aspinall, Edward., White, Sally., dan **Savirani, Amalinda.** (2021). “Women’s political representation in Indonesia: Who wins and How”, Special Edition “Women in Indonesian Elections”, *Journal of Current Southeast Asia Affairs*. GIGA, Germany, vol 40 (1), pp 3-27.
6. Savirani, Amalinda, Nuruddin Al Akbar, Ulya Jamson, and Listiana Asworo. (2021). ““Floating liberals”: Women politician and progressive politics in 2019 election in Indonesia”, Special Edition “Women in Indonesian Elections”, *Journal of Current Southeast Asia Affairs*. GIGA, Germany, vol 40 (1), pp 116-135.
7. Mustika, Wening and **Amalinda Savirani.** (2021). ““Ghost Account’, ‘Joki Account’, and ‘Account Theraphy’”: Everyday resistance of ride-hailing motorcycle taxis in Yogyakarta, Indonesia”. *The Copenhagen Journal of Asian Studies*, Vo; 39 (1), pp 48-67.
8. Purwaningrum, Diah Asih dan **Amalinda Savirani** (2021), “Architecture for Living; Do we design architecture for humans?” *The 8th Biannual International Conference (Artepolis 2022). Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol 602, Atlantis Press. <https://www.atlantispress.com/proceedings/artepolis-20/125964877>.
9. Savirani, Amalinda and Guntoro. (2020). “Between Street Demonstration and Ballot Box: Tenure Rights, Election and Social Movement”, *PCD Journal*, Vol 8 No 1.
10. Savirani, Amalinda and Edward Aspinall. (2018). “Adversarial Linkage: The Urban Poor and Electoral Politics in Jakarta”, in *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 36, 3, pp. 3–34.
11. Savirani, Amalinda and Edi Saedi. (2017), “Communal Citizenship among urban poor community in Penjaringan, North Jakarta”, in

Hiariej, E. and Kristian Stokke, *Popular Citizenship in Indonesia*, PolGov UGM.

12. Törnquist, Olle; Hanif, Hasrul; Hiariej, Eric, Samadhi, Willy; Savirani, Amalinda (2017), “The Downside of Indonesia's Successful Liberal Democratisation and the Way Ahead. Notes from the Participatory Surveys and Case Studies 2000–2016”, *Journal of Current Southeast Asia Affairs*, Vol 36, 1, pp. 123-138.
13. Savirani, Amalinda. (2016). “Survival against the odds: The Djunaid family of Pekalongan, Central Java”. *South East Asia Research* Vol. 24(3): 407-419.

Artikel bab dalam buku

1. Aspinall, Edward and **Amalinda Savirani** (2024), “Governing urban Indonesia: Trends and Challenges”, dalam Aspinall, Edward and **Amalinda Savirani** (eds) *Governing Urban in Indonesia*, ISEAS Singapore. Hal 1-23
2. **Savirani, Amalinda** and Pantoro Tri Kuswardono (2023), “Disrupsi Teknologi dan Gerakan Masyarakat Sipil di Indonesia”, in Poppy S Winanti and Wawan Mas’udi (eds), *Ilmu Sosial Politik Masa Depan: Menjawab Megashift?* pp 89-104, Yogyakarta, UGM Press.
3. **Savirani, Amalinda** (2022), “Union and Election: The Case of the Metal Workers Union in Elections in Bekasi, West Java”, dalam *The Jokowi-Prabowo Election 2.0*, Supriatma, Made Toni and Hui Yew-Fong (ed). ISEAS, Singapore.
4. **Savirani, Amalinda** (2021), “Material Politics dan Tren Kajian Masyarakat Sipil Masa Depan di Indonesia”, dalam Wawan Mas’udi dan Abdul Gaffar Karim (ed), *Tentang Kuasa: Lingkup Kajian, Metodologi dan Pengajaran Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Yogyakarta UGM Press, hal 155-164
5. Savirani, Amalinda (2021), “Big data dan Ilmu Politik Pemerintahan Masa Depan”, dalam Wawan Mas’udi dan Abdul Gaffar Karim (ed), *Tentang Kuasa: Lingkup Kajian, Metodologi dan Pengajaran Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Yogyakarta UGM Press, hal 25-39.

6. Savirani, Amalinda (2020), “Post-election Politics in Indonesia: Between economic growth and increased Islamic Conservatism”, in *Southeast Asian Affairs 2020*, ISEAS-Yusof Ishak Institute.
7. Djindan, Muhammad; Suzanna Eddyono; **Amalinda Savirani**; Rajiyem, Derajad Sulistyو Widhyharto (2020), “Metodologi Pemanfaatan Big Data dalam Ilmu Sosial”, dalam Kurnia, Novi; dan Amalinda Savirani (eds), *Big Data Untuk Ilmu Sosial: Antara Metode Riset Dan Realitas Sosial*, Yogyakarta, UGM Press.
8. Savirani, Amalinda (2014) “Resisting reforms: the persistence of Patrimonialism in Pekalongan’s Construction Sector”, dalam Gerry van Klinken dan Ward Berenschot (eds), *In Search of Middle Indonesia Middle Classes in Provincial Towns*, Brill, Leiden-Boston, hal 133-146
9. Savirani, Amalinda (2019), “The political middle class in Indonesia”, dalam Lane, Max (Ed), “Continuity and Change after Indonesia’s reforms”, Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Artikel populer

1. Fahadi, Prasakti Ramadhana, **Amalinda Savirani** and Ken Setiawan (2024), “Where are the women? Gender perspective in Indonesia’s 2024 Presidential Race”, Indonesia at Melbourne, 30 January, <https://www.melbourneasiareview.edu.au/prasakti-ramadhana-fahadi-amalinda-savirani-and-ken-setiawan/>
2. Savirani, Amalinda (2024), “Will Indonesia’s Youth Install a Political Dynasty?”, Zocalo Public Square, Zocalo Newsletter, 14 February, <https://www.zocalopublicsquare.org/2024/02/14/indonesia-election-letter-politica-dynasty/chronicles/letters/election-letters/>
3. Savirani, Amalinda (2024) “Konsolidasi Kelas Pekerja Melawan Politik Elitis”, *Project Multatuli*. <https://projectmultatuli.org/konsolidasi-kelas-pekerja-partai-buruh-melawan-politik-elitis/>
4. Savirani, Amalinda (2023), “Can Indonesia democracy keep up with urbanization?” The Jakarta Post, 14 September. Available online: <https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/09/14/can-indonesian-democracy-keep-up-with->

urbanization.html?fbclid=IwAR2SbArDVA6X-5uP-CjJ22KOMyyeHTxBhxFyk7AhlXE4-qV05FlepLfZyAQ

5. Savirani, Amalinda (2023), “Riset: hubungan antara kurikulum universitas dan motivasi mengikuti gerakan mahasiswa di Yogyakarta”, *The Conversation*, 26 October. <https://theconversation.com/drafts/215345>
6. Savirani, Amalinda (2023), “Labour Party Revives for 2024 Election”, *Indonesia At Melbourne*, 21 February, available online at <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/labour-party-revives-for-2024-elections/>.
7. Savirani, Amalinda, and Linda Yanti Sulistiawati (2021), “The Malady of Ignorance: Indonesian Parliament during COVID-19 Pandemic”, *New Mandala*, 6 April. Available online at <https://www.newmandala.org/the-malady-of-ignorance-indonesian-parliament-during-the-covid-19-pandemic/>.